

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Abdulgani, Roeslan, 1979, *Pengembangan Pancasila Di Indonesia*, Yayasan Idayu, Jakarta.
- Astawa, I Gde Pantja, 2008, *Dinamika Hukum dan Ilmu Perundang-undangan di Indonesia*, Alumni, Bandung.
- Attamimi, A. Hamid S., 1990, *Dinamika Hukum dan Ilmu Perundang-undangan di Indonesia*, PT. Alumni, Bandung.
- Darmadji, Tjiptono, 2001, *Restrukturisasi: Memulihkan dan Mengakselerasi Ekonomi Nasional*, Grasindo, Jakarta.
- Dewantara, Agustinus W., 2017, *Diskursus Filsafat Pancasila Dewasa Ini*, Kanisius, Yogyakarta.
- Fajar Sugianto, 2013, *Economic Analysis of Law: Seri Analisis Ke-ekonomian tentang Hukum*, Seri 1 Pengantar, Kencana Prenamedia Group, Jakarta.
- Fuady, Munir, 2001, *Pengantar Hukum Bisnis*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Fuady, Munir, 2005, *Hukum Pailit Dalam Teori dan Praktek, Edisi Revisi (Disesuaikan dengan UU Nomor 37 tahun 2004)*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Ginting, Elyta Ras, 2018, *Hukum Kepailitan Rapat-Rapat Kreditor*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta.
- Ginting, Elyta Ras, 2018, *Hukum Kepailitan Teori Kepailitan*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta.
- Iriantoro, Catur, 2014, *Penerapan Asas Kelangsungan Usaha Dalam Penyelesaian Perkara Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)*, Puslitbang Hukum Dan Peradilan Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI, Megamendung
- Kaelan, 2000, *Pendidikan Pancasila*, Paradigma, Yogyakarta.
- Kartohadiprodjo, Soediman, 2010, *Pancasila Sebagai Pandangan Hidup Bangsa*, Gatra Pustaka, Bandung.

- Kusumohamidjojo, Budiono, 2004, *Filsafat Hukum, Problematik Ketertiban Yang Adil*, Grasindo, Jakarta.
- Latif, Yudi, *Negara Paripurna: Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Lontoh, Rudly A. Lontoh, et al, 2001, *Penyelesaian Utang Piutang Melalui Pailit dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Alumni, Bandung.
- Mertokusumo, Sudikno, 1991, *Mengenal Hukum (suatu pengantar)*, edisi ke-3, Liberty, Yogyakarta.
- Mubyarto, 1987, *Ekonomi Pancasila Gagasan dan Kemungkinan*, LP3ES, Jakarta.
- Muljadi, Kartini dan Gunawan Widjaja, 2003, *Pedoman Menangani Perkara Kepailitan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Muzayin, 1992, *Ideologi Pancasila (Bimbingan ke Arah Penghayatan dan Pengamalan bagi Remaja)*, Golden Terayon Press, Jakarta.
- Notonegoro, 1974, *Pancasila Dasar Falsafah Negara*, Pantjuran Tudjuh, Jakarta.
- Pramono, Nindyo dan Sularto, 2017, *Hukum Kepailitan dan Keadilan Pancasila*, Penerbit Andi, Yogyakarta.
- Pusat Pendidikan Pancasila Dan Konstitusi Mahkamah Konstitusi RI, 2015, *Modul Pancasila Pendidikan Dan Pelatihan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara*, Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta.
- Remy Sjahdeini, Sutan, 2010, *Hukum Kepailitan: Memahami Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan*, edisi keempat, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta.
- Remy Sjahdeini, Sutan, 2010, *Hukum Kepailitan, Memahami Faillissements Verordening Juncto Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998*, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta.
- Ristekdikti, 2016, *Pendidikan Pancasila Untuk Perguruan Tinggi*, Cetakan Pertama, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Jakarta.
- Simanjuntak, Ricardo, 2023, *Undang-Undang Kepailitan dan PKPU Di Indonesia Teori Dan Praktik*, Cetakan Pertama, Kontan Publishing, Jakarta.

- Situmorang, Victor dan Soekarso, 1994, *Pengantar Hukum Kepailitan di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta.
- S, Sjahrir, 1982, *Sosialisme Indonesia Pembangunan*, Leppenas, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, 2009, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Cetakan ke-11, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Soeprapto, Maria Farida Indrati, 2007, *Ilmu Perundang-Undangan (1) (Jenis, Fungsi, Materi Muatan)*, Kanisius, Yogyakarta.
- Sunarmi, 2010, *Prinsip Keseimbangan Dalam Hukum Kepailitan Indonesia*, Edisi 2, Softmedia, Jakarta.
- Sudaryono, 2017, *Metodologi Penelitian*, Rajawali Pers, Depok.
- Sunarto, 1990, *Metode Penelitian Deskriptif*, Usaha Nasional, Surabaya.
- Wijayanta, Tata, 2016, *Undang-Undang dan Praktik Kepailitan: Perbandingan Indonesia dan Malaysia*, Cetakan Pertama, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- Wijayanta, Tata dan Muhammad Bagas A.H., 2021, *Cross Border Insolvency Kerjasama Lintas Batas Antar Lembaga Peradilan Perbandingan Indonesia, Malaysia, dan Korea Selatan*, Cetakan Pertama, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.

### **Artikel Jurnal**

- Anisah, Siti, 2009, "Studi Komparasi terhadap Perlindungan Kepentingan Kreditor dan Debitor dalam Hukum Kepailitan", *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, Volume 16, Edisi Khusus, Oktober.
- Pratiwi, Endang dan Theo Negoro, 2022, Teori Utilitarianisme Jeremy Bentham: Tujuan Hukum atau Metode Pengujian Produk Hukum, *Jurnal Konstitusi*, Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Volume 19, Nomor 2.
- Haq, M. Bagas Amirul Haq dan Tata Wijayanta, 2020, Recognition of Foreign Insolvency Proceedings: A Comparative Study between the Laws of Indonesia and South Korea. *International Journal of Innovation, Creativity and Change*, IJICC, Australia, Vol. 14, Issue 12.
- Iriantoro, Catur, 2015, Penerapan Asas Kelangsungan Usaha Dalam Penyelesaian Perkara Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU),

*Jurnal Hukum dan Peradilan*, Mahkamah Agung Republik Indonesia, Jakarta, Vol 4, No.3.

Juwana, Hikmahanto, 2005, The Reform of Economic Laws and its Effects on The Post-Crisis Indonesian Economy, *The Developing Economies*, Institute of Developing Economies, Jepang, Vol XLIII, No.1.

Munir, Misnal, 1995, Konsep Historisitas Filsafat Pancasila Dalam Pembangunan Di Indonesia”, *Jurnal Filsafat*, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Seri 22, hlm.1.

Subhan, Hadi, 2019, Misuse of Bankruptcy Petitions by Creditors: The Case of Indonesia, *International Journal of Innovation, Creativity and Change*, IJCC, London, Volume 10, Issue 6, Hlm.201.

Wijayanta, Tata, 2014, “Asas Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan Dalam Kaitannya Dengan Putusan Kepailitan Pengadilan Niaga”, *Jurnal Dinamika Hukum*, Fakultas Hukum Unsoed Purwokerto, Vol. 14, Nomor 2, Mei, Hlm.223

Wijayanta, Tata, 2014, “Kajian Tentang Pengaturan Syarat Kepailitan Menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004”, *Mimbar Hukum*, Vol. 26, Nomor 1, Fakultas Hukum UGM Yogyakarta, Februari, Hlm. 10.

### **Hasil Penelitian**

Kusuma, Anggi Putra, 2018, Proses Pembentukan Dan Pengesahan Perjanjian Perdamaian Serta Faktor-Faktor Yang Mempengaruhinya Dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Tesis, Tidak dipublikasikan, Program Magister Ilmu Hukum, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Siregar, William, 2019, Perbandingan Penyelesaian Perdamaian Proses Kepailitan Dan Perdamaian Proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Tesis, Tidak dipublikasikan, Program Magister Ilmu Hukum, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

### **Makalah**

M.D., Mahfud, 2009, Pancasila Hasil Karya dan Milik Bersama, Makalah pada Kongres Pancasila di UGM, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Setyamo, Eko Budi, 2006, Pengaruh Kualitas Audit, Kondisi Keuangan Perusahaan Opini Audit Tahun Sebelumnya, Pertumbuhan Perusahaan Terhadap Opini Audit Going Concern, Paper Simposium Akuntansi 9, Padang, Universitas Sebelas Maret, Solo.

## Internet

Henry Campbell, [2009}, *Dictionary Of Law 2nd Edition*, Boston Charities Inc. Boston, [2/6/2023].

Kaelan, “Pancasila Memberikan Nilai Dasar Yang Fundamental Dan Universal”, [2017], <https://www.mpr.go.id/berita/detail/prof-kaelan-pancasila-memberikan-nilai-dasar-yang-fundamental-dan-universal>, Majelis Permusyawaratan Republik Indonesia, Jakarta, [28/11/2023].

Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, [2014}, “45 Butir Pedoman Penghayatan dan Pengalaman Pancasila”, <https://www.kemhan.go.id/renhan/2014/11/20/45-butir-pedoman-penghayatan-dan-pengamalan-pancasila.html>, Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, Jakarta, [17/12/2022].

Merriam Webster Dictionary, <https://www.merriam-webster.com/dictionary/insolvent>, [22/03/2023].

Rahardjo, Dawam, [2021}, *Ekonomi Pancasila Dalam Tinjauan Filsafat Ilmu*, <https://ekonomikerakyatan.ugm.ac.id/publikasi/ekonomi-pancasila-dalam-tinjauan-filsafat-ilmu/>, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, [4/6/2023].

Rizal Ramli, [2008}, “IMF Berada Dibalik Pembentukan UU Kepailitan” [26/08/2008], <https://www.hukumonline.com/berita/a/rizal-ramli-imf-berada-di-balik-pembentukan-uu-kepailitan--hol19998>, Hukum Online, Jakarta, [8/12/2022].

Tim Hukum Online, [2003}, “5 Tahun Perpu Kepailitan Banyak Yang Kecewa Dengan Kepailitan” <https://www.hukumonline.com/berita/a/5-tahun-perpu-kepailitan-banyak-yang-kecewa-dengan-kepailitan-hol7867>, Hukum Online, Jakarta, [8/12/2022].

## Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 131, Tambahan Lembar Negara Nomor 4443).

Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 109/KMA/SK/IV/2020 Tahun 2020 tentang Pemberlakuan Buku Pedoman Penyelesaian Perkara Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

## Wawancara

RA, 2023, Praktik Perdamaian di Pengadilan Niaga, *Wawancara*, Palangkaraya. 10 Juni..

Swandaru, Sandi, 2023, Perdamaian Dalam Perspektif Pancasila, *Wawancara*, Yogyakarta. 23 Juni.